



Analisis Prosedur Barang Persediaan Logistik Keluar Gudang Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Moses Panggabean¹, Kalvin Edo Wahyudi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

E-mail addresses: mosespanggabean69@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online April 29, 2025

Kata Kunci:

Prosedur; logistik; Sitem Informasi; Koordinasi; Manajemen Waktu

Keywords:

Procedure; Logistics; Information System; Coordination; Time Management



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Prosedur barang persediaan logistik keluar merupakan prosedur yang dilakukan terkait tata laksana atau tahapan-tahapan dalam proses pemberian bantuan barang logistik yang dilakukan BPBD Prov. Jatim. Hal tersebut menjadi fokus bagi BPBD Prov. Jatim dalam memberikan layanan terkait proses pemberian bantuan yang dilaksanakan. Melalui pelaksanaan yang telah dilakukan, diharapkan agar BPBD Prov. Jatim melakukan kemajuan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi, koordinasi, maupun manajemen waktu pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur barang persediaan logistik keluar sesuai dengan fakta lapangan dan gangguan apa saja yang terjadi di dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk penelitian ini dan juga analisis dari penelitian terdahulu. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengambilan serta pengumpulan data pada penelitian ini agar menghasilkan suatu penelitian yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis prosedur barang persediaan logistik keluar di BPBBD Prov. Jatim belum berjalan secara maksimal. Hal

ini dikarenakan masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya dan terhambatnya pelaksanaan prosedur tersebut dikarenakan kurangnya peningkatan sistem informasi, koordinasi, dan manajemen waktu.

ABSTRACT

The procedure for outgoing logistics inventory is a procedure related to the management or stages in the process of providing logistical aid carried out by the East Java Provincial Disaster Management Agency. This has become a focus for the East Java Provincial Disaster Management Agency in providing services related to the aid distribution process being carried out. Through the implementation that has been carried out, it is hoped that the East Java Provincial Disaster Management Agency will make better progress in the use of technology, coordination, and employee time management. The purpose of this research is to understand how the implementation of the logistics inventory outflow procedure aligns with field facts and what obstacles occur in the execution of that procedure. The research method used is descriptive qualitative research from previous studies. With data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation, this aims to obtain accurate research results. The research results show that the analysis of the logistics inventory outflow procedure at the East Java Provincial Disaster Management Agency has not been running optimally. This is due to the ongoing issues in its implementation and the hindrance of the procedure's execution caused by the lack of improvement in information systems, coordination, and time management.

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan. Kemajuan tersebut terlihat pada terbangunnya komitmen

nasional, perkembangan peran kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan seiring dengan terbangunnya ketangguhan komunitas dan kemitraan seiring dengan terbangunnya ketangguhan komunitas dan kemitraan antar pihak untuk menghadapi risiko bencana (Monardo, 2022). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perkembangan penanggulangan bencana di Indonesia pada umumnya sudah mengalami kemajuan, salah satunya ialah adanya lembaga yang mengatur strategi dalam menanggulangi bencana.

BNBP atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia. BNBP memiliki tugas dan fungsi utama untuk membantu presiden dalam menanggulangi bencana yang sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dan mengalami perubahan nama dan struktur sejak kala berdirinya pada tahun 1945.

Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Provinsi Jawa Timur, 2023

BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
Gempa Bumi	1 Kejadian
Tsunami	-
Gempa Bumi dan Tsunami	-
Letusan Gunung Api	-
Tanah Longsor	5 Kejadian
Banjir	41 Kejadian
Kekeringan	1 Kejadian
Kebakaran Hutan dan Lahan	27 Kejadian
Cuaca Ekstrem	59 Kejadian
Glombang Pasang atau Abrasi	-
Total	134 Kejadian

Table 2. Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Timur, 2024

BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
Angin Kencang	127
Banjir	104
Kebakaran Hutan	90
Kebakaran Lahan	44
Angin Puting Beliung	12
Tanah Longsor	10
Lainya	6
Total	393

Tabel di atas merupakan salah satu dari 38 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur. Pada gambar tersebut dapat terlihat jelas bahwa kasus kejadian bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur meningkat yang semulanya pada tahun 2023 sebanyak 134 kejadian menjadi 393 kasus di tahun 2024. Sehingga, penanganan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur belum berjalan dengan maksimal karena adanya peningkatan dari sejumlah kasus.

Tentunya hal tersebut memang dapat dipengaruhi oleh faktor alam dan diluar kehendak manusia tetapi bencana seperti banjir, kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan longsor tentunya merupakan bencana yang dapat di antisipasi keberadaanya. Oleh karena itu diperlukannya penanggulangan bencana yang lebih dalam mengantisipasi hal tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jatim merupakan lembaga non-departemen yang mengatur segala teknis penanggulangan bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur tetapi berlandaskan peraturan oleh BNPB sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Tentunya BPBD Prov. Jatim sudah semaksimal mungkin melakukan penanggulangan seperti halnya dalam melaksanakan bantuan peralatan maupun logistik.

Bantuan peralatan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan dalam menanggulangi bencana dalam menanggulangnya, tentunya peralatan sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana saat tahapan dalam darurat bencana yaitu tahap pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Bantuan Logistik adalah rangkaian tindakan yang mengimplikasikan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian produk sesuai dengan kapasitas, jenis, waktu, dan tempat yang diinginkan atau dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia (Wijanarko, 2022). Masing-masing bantuan tersebut memiliki prosedur baik prosedur pengadaan barang, prosedur penyimpanan barang maupun prosedur pinjam-pakai barang dalam barang.

Menurut Nafarin, 2004:9 dalam (Ramadhany et al., 2021) menjelaskan prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam. Dengan demikian prosedur merupakan tata cara atau tata kelola yang saling berhubungan dan selalu dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang sama.

Prosedur pengadaan barang biasanya disebut juga sebagai prosedur barang persediaan logistik keluar karena prosedur ini mencakup pemberian bantuan logistik oleh BPBD Prov. Jatim kepada pemohon atau BPBD Kab/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Prosedur ini mencakup 6 (tahapan) mulai dari penerimaan form permintaan, konfirmasi ketersediaan barang, penyiapan barang, penyerahan, penandatanganan, dan pengarsipan.

Pelaksanaan prosedur barang persediaan logistik keluar melibatkan divisi satu sama lain, yaitu antara pengurus barang, pengelola gudang, dan pejabat penatausaha barang. Setiap divisi tersebut saling memberikan konfirmasi terkait pengambilan barang dan ketersediaan barang agar pengelolaan data barang logistik dapat sesuai dengan jumlah pemberian yang dilakukan kepada pemohon.

Pelaksanaan prosedur barang persediaan logistik keluar masih ditemukan permasalahan-permasalahan atau gap yang sering terjadi. Permasalahan yang sering ditemukan ketika melakukan tahap prosedur ialah pada tahapan konfirmasi ketersediaan barang, penyiapan barang, dan penyerahan barang. Permasalahan tersebut mencakup penggunaan sistem informasi yang kurang maksimal, koordinasi antar pengurus barang dan pengelola gudang, dan manajemen waktu oleh pengelola gudang. Tentunya, permasalahan tersebut sering menjadi faktor penghambat bagi BPBD Prov. Jatim dalam melaksanakan kinerjanya dan diperlukan analisis lebih

mendalam agar kejadian tersebut tidak berdampak buruk bagi kinerja pemerintahan dalam penanggulangan bencana.

Penelitian terdahulu menjadi landasan analisis untuk mengetahui pelaksanaan prosedur barang persediaan logistik keluar tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau bahkan prosedurnya tidak berjalan secara maksimal. Dengan demikian, Proses pelaksanaan prosedur tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi karena memberikan layanan untuk penanggulangan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat terutama didalam bantuan logistik.

2. METODE

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggambaran dan pendeskripsian melalui pengamatan yang dilakukan lalu dituang melalui kata secara sistematis dan terperinci. Penelitian ini berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menganalisis prosedur barang persediaan logistik keluar yang diberikan kepada kabupaten atau daerah Jawa Timur untuk bantuan penanggulangan bencana. Purposive sampling digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini, yaitu informan yang akan menjadi landasannya dan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi informannya. Pengamatan, Wawancara, dan Dokumentasi kegiatan merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan tujuan agar menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Logistik

Logistik adalah serangkaian metode yang mencakup efisiensi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan tujuan mengangkut produk, layanan, energi, dan sumber data lainnya dari titik awal hingga titik konsumsi. Dalam situasi ini, konsep logistik merujuk pada entitas atau objek yang disampaikan kepada orang lain dengan berbagai cara untuk memanfaatkan keuntungannya.

Namun, terkait dengan definisi logistik dalam konteks bencana, menurut definisi logistik dalam kerangka bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, logistik merujuk pada segala sesuatu yang ada dan dapat digunakan untuk memastikan keamanan pangan, makanan, tempat tinggal, dan elemen terkait lainnya. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008).

Bantuan logistik adalah bantuan yang dapat digunakan kembali atau yang mencakup produk-produk yang nilainya dapat berkurang. Dukungan logistik diberikan berdasarkan jenis dan kerusakan yang dialami selama bencana. Biasanya, dalam setiap bencana yang menyebabkan kerugian materi bagi penduduk, yang memerlukan makanan cepat saji dan mudah disiapkan, orang-orang akan diberikan bantuan seperti sembako, produk kesehatan, pakaian, dan peralatan penting lainnya untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

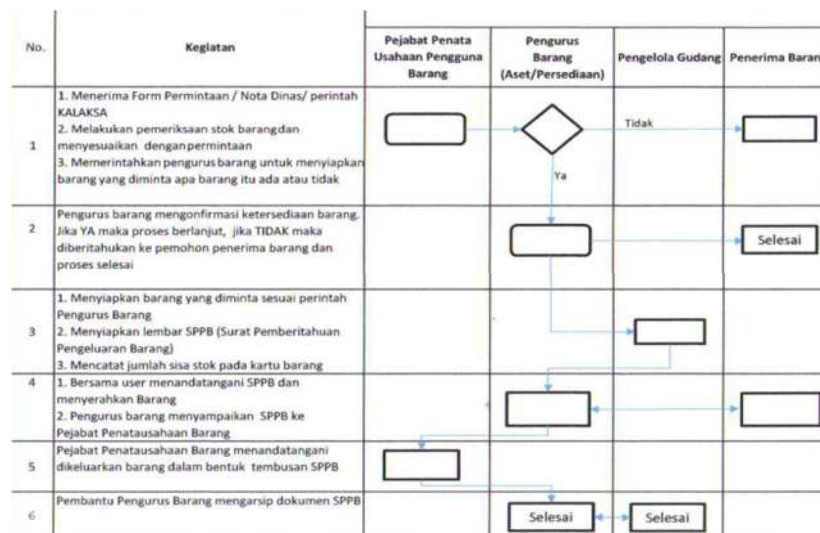
Prosedur

(Lilis Puspitawati, 2021) mendefinisikan sebagai prosedur adalah rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian yang disusun secara terstruktur yang dilakukan secara terus-menerus agar mendapatkan keseragaman di dalam organisasi.

Prosedur juga memiliki karakteristik yang dijabarkan oleh (Rasto, 2015) dalam (Aristu, 2023) terdapat 6 (enam) bagian yang menjadi karakteristik dari prosedur, antara lain:

- 1) Prosedur memberikan rangkaian tindakan, artinya adalah dalam melakukan kegiatan apapun, setiap pegawai diarahkan untuk mengikuti sebuah alur tertentu. Hal tersebut meminimalkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan,
- 2) Penggunaan sumber daya yang ekonomis, artinya prosedur menjadi efisien karena mengurangi kegiatan yang tidak perlu dan tidak menunda pekerjaan.
- 3) Koordinasi yang difasilitasi, artinya prosedur berguna menjadi landasan dalam melakukan pengorganisasian antara bagian yang berbeda di dalam suatu organisasi.
- 4) Pengendalian dasar, artinya prosedur sebagai landasan dalam perbandingan kinerja yang aktual dan standar. Oleh karena itu, prosedur dapat mematok suatu penyimpangan.
- 5) Pelatihan karyawan baru, artinya prosedur kerja dapat membuat karyawan baru untuk memahami pekerjaan dengan mudah.
- 6) Operasional lancar, artinya prosedur berguna untuk melakukan kegiatan perkantoran melalui efektifitas dan ekonomis karena bisa mempersingkat teknis pelaksanaan, menghapus formulir yang tidak berguna, dan meminimalisir aktivitas berduplikasi.

Prosedur barang persediaan logistik keluar oleh BPBD Prov. Jatim



Gambar 1. SOP Barang Persediaan Logistik Keluar Oleh BPBD Prov. Jatim

Terdapat prosedur yang digunakan dalam mengelola persediaan bantuan logistik, dan salah satunya adalah prosedur barang persediaan logistik keluar. Prosedur barang persediaan logistik keluar merupakan prosedur yang digunakan untuk memberikan bantuan logistik dari BPBD Prov. Jatim kepada BPBD Kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tujuan dilakukannya prosedur ini adalah untuk mengetahui tahapan apa saja yang harus dilalui sebelum dilakukannya penyerahan barang agar berjalan dengan baik. Dengan demikian, penggunaan barang bantuan logistik tersebut tidak disalahgunakan dan terkonfirmasi penggunaannya. Pelaksanaan Prosedur ini mencakup 6 (enam) tahapan, yang di didalam pelaksanaannya ada yang berjalan dengan baik dan masih ada proses yang mengalami permasalahan dan menghambat kinerja di dalam pelaksanaannya.

1. Penerimaan Form Permintaan/ Nota Dinas/Perintah Kalaksa Bantuan Logistik.

Penerimaan form permintaan ini menjadi tahapan awal dalam prosedur barang persediaan logistik keluar yang di mana permohonan bantuan dapat diterima melalui form permintaan dari BPBD Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, Nota Dinas maupun Perintah kepala pelaksana. Tujuan dilakukan penerimaan ini agar mengetahui apa saja permintaan yang diajukan oleh pemohon untuk diberikannya bantuan logistik tersebut. Di dalam pelaksanaan form permintaan ini tidak ditemukan adanya gap. atau permasalahan mengenai hal tersebut dikarenakan ini hanyalah sebuah penerimaan form permintaan dan dari form permintaan ini dapat diketahui di daerah mana bantuan logistik ini diberikan, dan apa saja bantuan yang dibutuhkan dan apa tujuan dilakukannya permohonan permintaan tersebut.

2. Konfirmasi Ketersediaan Barang

Menanggapi permohonan yang diberikan oleh pemohon selanjutnya akan dilakukan checking barang dan dilihat persediaannya mencukupi atau tidak. Jika tersedia, maka akan dilanjutkan ke proses prosedur selanjutnya, dan apabila barang yang diminta tidak tersedia, maka prosesnya akan selesai. Konfirmasi ketersediaan barang ini dilakukan pengecekan stok melalui Excel pengelolaan barang bantuan logistik dan akan dikonfirmasi ketersediaannya. Penggunaan Excel inilah yang menjadi faktor kemunduran yang terjadi di BPBD Prov. Jatim dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya dalam mengelola jumlah ketersediaan barang logistik dulunya menggunakan sebuah link atau web di dalam pengelolaan datanya. Namun, link atau web yang digunakan tidak berjalan dengan baik, sering terjadi *trouble* dan belum dilakukan *update* atau pembaharuan sistem, sehingga BPBD Prov. Jatim menggunakan Excel dalam pengelolaan data barang logistik.

3. Penyiapan Sekaligus Penyiapan Lembar SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang)

Setelah dilakukannya pengecekan barang dan barang masih tersedia, maka akan dilanjutkan kepada proses selanjutnya yaitu penyiapan barang dan penyiapan SPPB. Penyiapan SPPB merupakan wujud formalitas agar barang tersebut benar-benar akan diserahkan kepada pemohon dan penyiapan barang dilakukan dengan melihat jumlah stok yang ada di gudang dan dilakukan pencatatan pengambilan stok barang serta pengurangan jumlah stok. Dalam pelaksanaan prosedur tahap ini,

masih ditemukan kendala yang dimana pengelola gudang yang menyiapkan barang tidak memberitahukan konfirmasi barang tersebut kepada pengurus barang. Sehingga, pengurus barang akan kebingungan, dalam melakukan penyesuaian ketersediaan antara di data dan di gudang dan solusi yang dilakukan ialah dengan membuat surat penggunaan barang (barang yang diambil tanpa konfirmasi) untuk kegiatan yang lain walaupun barang itu tidak ada.

4. Penandatanganan SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) oleh pemohon dan pengurus barang serta penyerahan bantuan logistik

Setelah dilakukannya penyiapan barang, langkah selanjutnya ialah penandatanganan SPPB dan dilakukan penyerahan. penandatanganan SPPB ini dilakukan oleh pemohon dan pengurus barang. Yang selanjutnya akan dilakukan penyerahan bantuan kepada pemohon. Dalam pelaksanaannya masih terdapat gap atau masalah karena sering terjadi pengurus gudang tidak berada di lokasi saat akan dilakukannya penyerahan barang. Ketika melakukan penyerahan barang, pemohon akan datang ke BPBD Prov. Jatim dan akan diberikan kepada pemohon lewat pengurus gudang. Akan tetapi, pengurus gudang kadang tidak berada di lokasi karena melakukan perjalanan dinas keluar kota dan melakukan pekerjaan lain tanpa konfirmasi sehingga membuat penyerahan bantuan terpaksa dilakukan oleh pengurus barang tanpa mengetahui persediaan yang diberikan sesuai kapasitas yang seharusnya.

5. Penandatanganan SPPB (Surat Pemberitahuan Pegeluaran Barang) Oleh Pejabat Penatausaha Barang

Setelah dilakukan penyerahan barang dan penandatanganan oleh pemohon serta pengurus barang selanjutnya berkas SPPB akan diberikan kepada pejabat penatausaha barang. Penandatanganan ini menjadi wujud konfirmasi bahwa barang tersebut sudah diberikan kepada pemohon dan sudah dilakukan pengelolaan jumlah stok sisa oleh BPBD Prov. Jatim dengan demikian proses pemberian bantuan selesai.

6. Pengarsipan Dokumen SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) Oleh Pembantu Pengurus Barang

Pengarsipan ini dilakukan setelah semua proses sudah selesai, mulai dari awal hingga akhir. Dilakukannya pengarsipan ini membutuhkan dokumen Form permintaan/Nota Dinas/Perintah KALAKSA, kartu stok, dokumen SPPB yang sudah ditandatangani oleh pemohon, pengurus barang dan pejabat penatausaha barang serta dokumentasi setiap pelaksanaan yang dilakukan seperti penyiapan dan penyerahan. Dengan demikian, pengarsipan ini menjadi rekapan bantuan selama berlangsungnya pengiriman bantuan logistik setahun terakhir.

Pembahasan

Analisis Prosedur barang persediaan logistik keluar oleh BPBD Prov. Jatim

Berdasarkan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Adawiyah, 2022), menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kontrol efektivitas gudang seperti Warehouse Management System (WMS) dapat membantu pekerjaan pergudangan dalam mengontrol proses pergerakan dan penyimpanan dengan baik. Sehingga, BPBD Prov. Jatim perlu mengimplementasikan kembali penggunaan

sistem informasi dalam pendataan data barang logistik agar dapat mengontrol pergerakan dan penyimpanan barang dengan baik. Penggunaan Excel memang tidak salah, namun mengingat banyaknya data yang dikelola pada setiap kabupaten/kota dan banyaknya jenis bantuan membuat pengerjaannya tidak berjalan berdasarkan efektifitas dan efisiensi serta membutuhkan proses yang lama.

Penelitian selanjutnya juga dikemukakan oleh (Dmaic et al., 2022) yang menjelaskan bahwa dalam mencapai kolaborasi, sharing data, dan informasi antar dua divisi yang lebih efisien disarankan agar kedua divisi lebih meningkatkan koordinasi, terutama dalam hal pertukaran data dan informasi secara efisien. Pegurus gudang BPBD Prov. Jatim masih perlu dilakukan pengawasan yang lebih dalam penggunaan dan pengambilan barang agar terkonfirmasi dengan baik, mengingat data bantuan tersebut sangatlah dibutuhkan untuk masyarakat yang mengalami bencana. Dengan demikian, peningkatan koordinasi antara divisi satu sama lain supaya bisa berjalan dengan baik dan terorganisir.

penelitian mengenai petugas gudang juga dikemukakan oleh (Sutinem & Puspitasari, 2022), menyatakan bahwa petugas gudang atau pengelola gudang memiliki tugas penting dalam melakukan penerimaan akan permintaan dan pesanan dari bagian gudang, mengurus data-data pengiriman, lalu menjaga kualitas layanan pengiriman barang kepada konsumen. Sehingga, untuk posisi admin gudang ini memiliki banyak cakupan kerja dan membutuhkan kualifikasi pekerja yang cukup tinggi. BPBD Prov. Jatim tentunya membutuhkan peningkatan kinerja petugas gudang agar mengetahui jadwal piket supaya tidak mengalami bentrok antara dinas dan piket dan pengawasan untuk jadwal juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, jika dilakukannya manajemen waktu yang baik oleh petugas gudang maka kinerja dalam pemberian layanan kepada pemohon dan pengelolaan barang di gudang dapat berjalan dengan maksimal dan tidak terkendala.

Semua penelitian terdahulu tersebut menjadi analisis yang dilakukan agar BPBD Prov. Jatim lebih belajar lagi baik di dalam pengelolaan sistem informasi, koordinasi dan manajemen waktu karena pekerjaan yang dilakukan menyangkut kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana yang terjadi. Dengan demikian, peningkatan hal tersebut sangat ditekankan sebagai bentuk pelayanan masyarakat yang berkualitas dan berfokus pada kemajuan. Dari hal tersebut, BPBD Prov. Jatim bisa menjadi lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik tanpa terkendala sedikit pun.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Prosedur barang persediaan logistik keluar merupakan suatu tahapan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pemberian bantuan barang logistik kepada pemohon agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tidak dilakukan penyalahgunaan barang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dari tiga prosedur dalam pengadaan bantuan logistik, sehingga dibutuhkan kualifikasi yang tinggi dalam pelaksanaannya agar semua prosedur tersebut dapat berjalan maksimal dan tidak mengganggu prosedur yang lainnya.

Secara keseluruhan prosedur barang persediaan logistik keluar masih belum berjalan secara maksimal, karena dari 6 (enam) prosedur yang ada terdapat 3 (tiga) prosedur yang mengalami permasalahan dan 3 (tiga) prosedur berjalan dengan baik.

Prosedur yang masih memiliki permasalahan seperti konfirmasi ketersediaan barang, penyiapan barang, dan penyerahan barang masih menjadi penghambat bagi kinerja pelaksanaan pemberian bantuan logistik. Sehingga, diharapkan selalu dilakukannya inovasi terkait pelayanan prosedur yang diberikan agar bantuan yang diberikan kepada pemohon dapat berdampak kepada masyarakat yang luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Gudang. *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, 2(2), 72-77. <https://doi.org/10.55122/blogchain.v2i2.539>
- Aristu, R. A. (2023). PITA CUKAI MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA Disusun Oleh: RIFALDI ALSTONIA ARISTU PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2008). Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. 1-28.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Provinsi, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUZaMGVteFVjSEJ4T1RCMIlyRjRTazVvVDJocVFUMDkjMw==/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-provinsi.html?year=2023>
- Dmaic, M., Pt, D. I., Indonesia, A., & Persero, F. (2022). ANALISIS PENYEBAB DEAD STOCK SPAREPART KAPAL MENGGUNAKAN. 12(01), 37-45.
- Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.SSI., AK, C. (2021). Sistem Informasi Akuntansi: Vol. I (Issue 3).
- Monardo, D. (2022). Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 Rencana Nasional.
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Ery Dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i1.152>
- Rasto, M. P. (2015). Manajemen Perkantoran paradigma baru. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Teknologi*, 296.
- Sutinem, S., & Puspitasari, A. M. (2022). Sistem Manajemen Pergudangan Logistik Studi pada PT. Implora Sukses Abadi. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 3(1), 22-29. <https://doi.org/10.57084/bej.v3i1.678>
- Wijanarko, R. (2022). Efektivitas Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penyaluran Bantuan Logistik Pada Korban Bencana Banjir Di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107-115.